

Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, Jawa Barat

Harvesting non-timber forest products in Mount Halimun Salak National Park by Kasepuhan Sinar Resmi Indigenous People, West Java

YELIN ADALINA

Pusat Penelitian dan Pengembangan Hutan. Jl. Gunung Batu No.5, Bogor, Jawa Barat. Tel. +62-251-863324; 7520067. Fax.: +62-251-8638111, *email: yelinadalina@yahoo.com

Manuskrip diterima: 31 Agustus 2016. Revisi disetujui: 31 Januari 2017.

Abstrak. Adalina Y. 2017. *Pemanfaatan hasil hutan bukan kayu di Taman Nasional Gunung Halimun Salak oleh Masyarakat Kasepuhan Sinar Resmi, Jawa Barat. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 3: 75-80.* Masyarakat Adat Kasepuhan sudah lama bermukim di sekitar kawasan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) sebelum adanya perluasan kawasan taman nasional dari luas 40.000 hektar menjadi 113.000 hektar. Keberadaan masyarakat Kasepuhan tidak dapat dipisahkan dalam pengelolaan TNGHS. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui jenis pemanfaatan TNGHS oleh masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Penelitian dilakukan di Desa Sinar Resmi pada bulan September 2014. Sebanyak 32 responden dipilih secara random. Responden merupakan masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Data dianalisis secara kuantitatif dan kualitatif. Jenis hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dimanfaatkan yaitu: 18,75% responden memanfaatkan tanaman obat, seluruh responden (100%) memanfaatkan kayu bakar, 43,75% menggunakan bambu, 6,25% memanfaatkan tanaman hias, 6,25% memanfaatkan rotan, dan 40,62% memanfaatkan rumput sebagai pakan ternak. Selain pemungutan HHBK, masyarakat Kasepuhan juga menggunakan lahan garapan TNGHS. Penggunaan lahan TNGHS memberikan kontribusi sebesar 42,29% terhadap total pendapatan rumah tangga responden. Sumberdaya TNGHS merupakan tumpuan hidup bagi masyarakat Kasepuhan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

Kata kunci: Hasil hutan bukan kayu, masyarakat Adat Kasepuhan, Taman Nasional Gunung Halimun Salak

Abstract. Adalina Y. 2017. *Harvesting non-timber forest products in Mount Halimun Salak National Park by Kasepuhan Sinar Resmi Indigenous People, West Java. Pros Sem Nas Masy Biodiv Indon 3: 75-80.* Kasepuhan indigenous people have been living around Mount Halimun Salak National Park (MHSNP) for a long time before MHSNP area expanded from 40,000 hectares to 113,000 hectares. The existence of Kasepuhan Community can not be separated in MHSNP management. This study aims to determine the type of utilization of MHSNP by Kasepuhan Sinar Resmi Indigenous People. The utilization consists of land use utilization and non timber forest products (NTFPs) utilization. The study was conducted in Sinar Resmi village in September 2014 with a total of 32 respondents from Kasepuhan Sinar Resmi People that were selected randomly/intentionally (purposive sampling). Data were analyzed quantitatively and qualitatively. Types of NTFPs that are utilized: 18.75% of respondents utilize medicinal plants, all respondents utilize firewood, 43.75% utilize bamboo, 6.25% utilize ornamental plants, 6.25% utilize rattan, and 40.62% of respondents utilize grass as fodder. Besides harvesting non timber forest products, Kasepuhan People also using MHSNP as arable land. Land using of MHSNP contributed 42.29% of the total household income of respondents. MHSNP natural resources are the foundation of life for Kasepuhan People in meeting their needs.

Keywords: Non timber forest products, Kasepuhan indigenous people, Mount Halimun Salak National Park

PENDAHULUAN

Berdasarkan SK Menteri Kehutanan No.175/Kpts-II/2003 Taman Nasional Gunung Halimun (TNGH) diperluas dari ± 40.000 hektar (ha) menjadi ± 113.357 ha. Secara filosofis, suatu kawasan yang ditetapkan sebagai taman nasional mempunyai tiga manfaat, yaitu manfaat ekologi, ekonomi dan sosial. Melalui pemanfaatan pada bidang konservasi, penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya, budaya dan wisata alam diharapkan masyarakat sekitar akan meningkat kesejahteraannya, sementara keutuhan dan kelestarian

sumberdaya alam dalam kawasan taman nasional tetap terjaga sehingga terjadi keseimbangan antara upaya konservasi dengan upaya peningkatan kesejahteraan masyarakat sekitar hutan (Suhaeri, 1994).

Hampir seluruh kawasan Konservasi di Indonesia tidak dapat dipisahkan keberadaannya dengan masyarakat yang ada di sekitarnya (Ristianasari et al. 2013). Begitupula keberadaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak (TNGHS) tidak dapat dipisahkan dari masyarakat yang berada di dalam dan di sekitar kawasan yang memiliki tingkat ketergantungan tinggi terhadap sumber daya alam yang ada di dalam kawasan. Terdapat 108 desa yang

berbatasan langsung dengan wilayah TNGHS dan 314 kampung dengan 99.782 jiwa yang berada di dalam kawasan TNGHS (Balai TNGHS 2007).

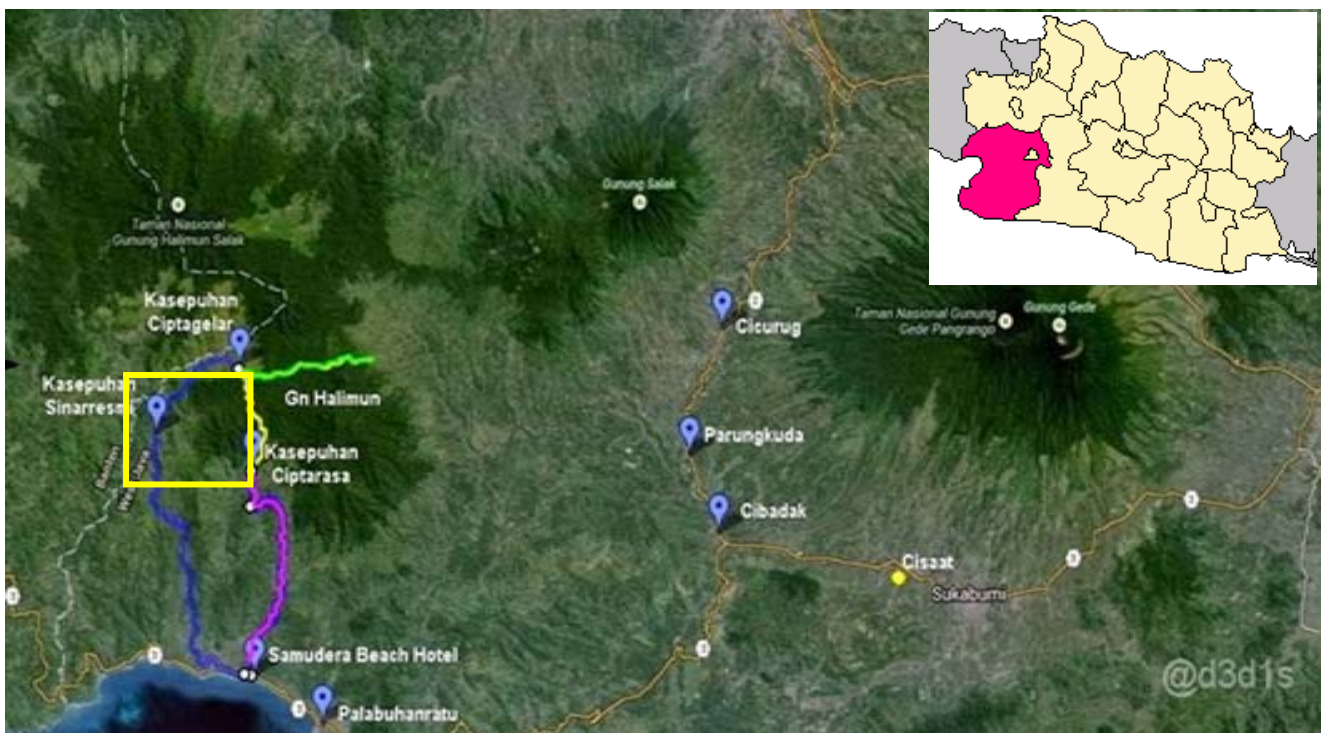
Perluasan kawasan TNGHS pada tahun 2003 telah menimbulkan konflik antara pengelola TNGHS, pemerintah daerah dan masyarakat yang bermukim di dalam dan di sekitar kawasan TNGHS (Yatap 2008). Sebelum adanya perluasan kawasan TNGHS, di sekitar kawasan telah lama tinggal masyarakat adat dan non adat yang memiliki karakteristik yang beragam. Masyarakat Adat sudah menempati wilayah TNGHS sejak abad 19, yakni pada zaman Kerajaan Pajajaran. Berbagai program pemberdayaan masyarakat, restorasi dan rehabilitasi kawasan telah dilakukan oleh Pengelola Taman Nasional, tetapi seringkali mengalami kegagalan. Hal ini disebabkan oleh adanya kepentingan yang berbeda antara masyarakat dengan pihak pengelola taman nasional. Pengelola taman nasional berupaya memprioritaskan pelestarian dan perlindungan terhadap fungsi taman nasional (Yatap 2008) tetapi di lain pihak, masyarakat harus memenuhi kebutuhan hidup mereka. Kehidupan masyarakat setempat masih tergantung pada kegiatan pertanian (Budiman dan Adhikerana 2000). Oleh karena itu diperlukan bentuk interaksi antara masyarakat dan pihak pengelola agar fungsi taman nasional tetap maksimal, dan di sisi lain kesejahteraan masyarakat terpenuhi. Kelestarian hutan tidak dapat dipisahkan dari kondisi ekologis, ekonomis maupun sosial masyarakat sekitar hutan (Junaidi dan Maryani 2013; Kartodihardjo 2013). Pengelolaan hutan perlu diarahkan sebagai penghasil hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dapat membuka kegiatan dan penghasilan bagi masyarakat lokal dengan memperhatikan faktor ekologisnya. Atas dasar latar belakang tersebut perlu

dilakukan penelitian tentang pemanfaatan sumberdaya hutan TNGHS bagi masyarakat sekitar hutan. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui pemanfaatan jenis hasil hutan bukan kayu di kawasan TNGHS yang dilakukan oleh masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi.

BAHAN DAN METODE

Penelitian dilakukan pada bulan September 2014 di Desa Sinar Resmi (Gambar 1). Secara administrasi pemerintahan, lokasi penelitian terletak di Kecamatan Cisulok, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat. Secara geografis desa ini terletak antara antara $106^{\circ} 27' - 106^{\circ} 33' BT$ dan $6^{\circ} 52' - 6^{\circ} 44' LS$, memiliki topografi bergelombang sampai bergunung dengan ketinggian 600-1200 m dpl dengan luas wilayah 4.917 ha. Temperatur udara bervariasi antara $21-30^{\circ}C$ dengan temperatur rata-rata $28^{\circ}C$, memiliki curah hujan antara 2120-3250 mm/tahun dengan kelembaban udaranya 84 %.

Pendekatan penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan dukungan pendekatan kualitatif. Metode penelitian adalah survei menggunakan kuesioner. Pengumpulan data dilakukan melalui studi pustaka, wawancara dan observasi. Jenis data yang dikumpulkan terdiri dari data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui observasi dan wawancara langsung dengan responden dan pengisian kuesioner. Data primer terdiri dari karakteristik individu dan jenis pemanfaatan HHBK oleh masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi. Data sekunder diperoleh dari studi pustaka, kantor desa dan Balai TNGHS.



Gambar 1. Lokasi desa penelitian di Desa Sirmaresi, Kecamatan Cisolak, Kabupaten Sukabumi, Provinsi Jawa Barat

Responden merupakan kepala rumah tangga yang bertempat tinggal di desa penelitian. Responden merupakan masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi yang mempunyai lahan garapan di kawasan TNGHS. Terdapat empat kampung di Desa Sirna Resmi yang masyarakatnya menggunakan lahan kawasan TNGHS, yaitu terdiri dari kampung Cimapag, Kampung Cibalandongan Kampung Cipagon, dan Kampung Cikaret. Pemilihan responden pada masing-masing kampung dipilih secara acak. Jumlah responden yang diwawancarai sebanyak 32 responden yang terdiri dari 12 responden dari Kampung Cimapag, empat responden dari Kampung Cibalandongan, sembilan responden dari Kampung Cipagon dan tujuh responden dari Kampung Cikaret. Analisis terhadap data primer dan informasi yang diperoleh dari wawancara dan observasi dianalisis secara deskriptif, yaitu suatu analisis yang memberikan penjelasan, keterangan dan gambaran tentang objek penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Karakteristik responden

Mayoritas responden (78,12%) tergolong pada usia produktif dengan rata rata usia 45 tahun (Adalina et al. 2015). Mantra (2000) menemukan bahwa yang tergolong usia produktif adalah yang berumur di atas 15 tahun sampai 55 tahun. Umur merupakan salah satu faktor yang berpengaruh terhadap aktivitas manusia dalam memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Data menunjukkan bahwa responden yang berusia produktif mampu melakukan aktivitas produktif secara maksimal untuk mencari berbagai usaha yang dapat menambah penghasilan dalam rangka memenuhi kebutuhan keluarganya dibanding dengan responden yang berusia tidak produktif (di atas 55 tahun). Petani yang berusia produktif pada umumnya mampu menerima dengan cepat inovasi ataupun ide-ide baru yang dianjurkan dibandingkan petani yang berusia tidak produktif (Kadir 2005).

Mayoritas responden (93,70%) memiliki tingkat pendidikan formal yang rendah, yaitu dengan tingkat pendidikan Sekolah Dasar. Kondisi ini menyebabkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan menjadi sangat besar. Rendahnya tingkat pendidikan masyarakat diakibatkan adanya keterbatasan biaya, sarana, dan prasarana (Adalina et al. 2015). Indikator tingkat pendidikan formal menunjukkan bahwa kualitas sumber daya manusia di sekitar kawasan TNGHS mayoritas dalam kategori rendah. Waluyo et al., (2010) mengemukakan bahwa pendidikan formal merupakan salah satu indikator untuk mengetahui kemampuan petani dalam menerima inovasi baru. Masyarakat dengan tingkat pendidikan rendah sulit untuk menerima hal-hal baru atau inovasi yang dapat menambah wawasan, pengalaman dan pengetahuan (Kadir 2005).

Semua responden (100%) mempunyai mata pencaharian utama sebagai petani. Sebagian besar masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi memiliki mata pencaharian sebagai petani, dimana sektor pertanian menjadi sumber

penghidupan utama. Hal ini karena kondisi alam di desa ini sangat mendukung dalam kegiatan pertanian. Kegiatan pertanian yang dilakukan oleh masyarakat Kasepuhan menjadi bagian dari budaya masyarakat dengan tradisi secara turun-temurun. Kegiatan pertanian masih secara tradisional dan memiliki hubungan yang erat dengan praktek pertanian, institusi sosial, sistem kepercayaan dengan unsur-unsur alam seperti tanah, air, udara, sinar matahari, cuaca dan lain-lain (Rahmawati et al. 2008). Kegiatan pertanian berdasarkan filosofi “Ibu Bumi, Bapak Langit, dan Guru Mangsa” yang berarti dalam kehidupannya, masyarakat harus menjaga keutuhan bumi serta segala isinya sehingga keseimbangan alam pun tetap terjaga. Masyarakat menerapkan panen padi hanya sekali dalam satu tahun, hal ini dilakukan untuk memberikan penghormatan kepada Ibu Bumi. Masyarakat berkeyakinan bahwa bumi diibaratkan sebagai makhluk hidup sehingga ketika akan mengolah lahan perlu meminta ijin terlebih dahulu melalui upacara adat.

Sebanyak 37,5% responden mempunyai pekerjaan sampingan sebagai buruh, dan 25% responden tidak memiliki pekerjaan sampingan. Rata-rata total pendapatan responden (pekerjaan utama dan pekerjaan sampingan) sebesar Rp 1.087.000 dengan selang antara Rp 464.000 sampai Rp 2.566.000,0/bulan (Adalina et al. 2015). Pendapatan keluarga diukur dengan banyaknya akumulasi pendapatan semua anggota keluarga dalam satu bulan (Rp/bulan), baik dari pendapatan utama maupun pendapatan dari pekerjaan sampingan. Masri (2010) mengemukakan bahwa aspek ekonomi masyarakat menggambarkan mata pencaharian dan tingkat pendapatan masyarakat. Apabila ditinjau dari Upah Minimum Regional (UMR) Kabupaten Sukabumi yaitu sebesar Rp 1.201.000) maka rata-rata tingkat pendapatan responden masih berada di bawah UMR. Hal ini dikarenakan mayoritas responden mengandalkan dari hasil pertanian sebagai pekerjaan utama. Penghasilan responden dari hasil pertanian tidak menentu, sangat dipengaruhi oleh faktor cuaca, dan faktor pasar (penawaran dan permintaan barang).

Jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) yang dilakukan oleh masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi antara lain yaitu kayu bakar, tumbuhan obat, tanaman hias, kerajinan tangan, buah-buahan dan pakan ternak (Tabel 1). Bagi masyarakat di sekitar hutan keberadaan kawasan hutan sangat berarti bagi kelangsungan hidupnya yang dapat memberikan nilai tambah bagi kehidupan mereka (Birgantoro dan Nurrochmat 2007). Interaksi masyarakat Kasepuhan dengan kawasan hutan yang saat ini merupakan kawasan TNGHS telah terjalin sejak lama. Masyarakat adat Kasepuhan sudah sejak lama menempati kawasan hutan yaitu sejak abad ke-19 sebelum adanya perluasan kawasan. Hal ini menunjukkan tingkat ketergantungan masyarakat terhadap sumberdaya hutan TNGHS. Masyarakat Adat Kasepuhan melindungi hutan berdasarkan konsep turun temurun berdasarkan *leuweung titipan* (hutan titipan), *leuweung tutupan* (hutan tutupan) dan *leuweung sampalan*

(hutan bukaan) (Balai TNGHS 2007). Oleh karena itu untuk mengurangi ketergantungan masyarakat akan sumberdaya hutan, maka pihak pengelola perlu memberikan bantuan alternatif dalam rangka meningkatkan tingkat ekonomi masyarakat sekitar hutan. Adanya masyarakat di sekitar hutan yang mempunyai akses langsung maupun tidak langsung terhadap kawasan hutan dan memanfaatkan sumberdaya hutan suatu kenyataan yang tidak dapat diabaikan. Hal ini dapat berdampak positif maupun negatif terhadap kelestarian hutan (Birgantoro dan Nurrochmat 2007). Jacobson dan Shiba (2012) mengemukakan bahwa dalam pengelolaan hutan maka pengembangan HHBK perlu direncanakan untuk meningkatkan pendapatan alternatif masyarakat yang mempunyai ketergantungan terhadap sumberdaya hutan dengan memperhatikan faktor sosial ekonomi masyarakat dan kondisi hutan.

Semua responden (100%) memanfaatkan kayu bakar. Jenis kayu bakar yang dimanfaatkan antara lain bambu, kayu jenjing kayu Afrika, tisuk, jabon, pinus, dan pasang. Kayu yang dimanfaatkan berupa ranting. Semua responden (100%) menggunakan kayu bakar jenjing. Hal ini karena semua responden menanam kayu jenjing di lahan garapannya. Rata-rata kebutuhan kayu bakar responden sebanyak 6,5 ikat per bulan dengan selang antara 2 ikat sampai 15 ikat. Harga per ikat sebesar Rp 20.000, sehingga rata-rata kebutuhan responden untuk kayu bakar sebesar Rp 130.000/bulan dengan selang berkisar antara Rp 40.000 sampai Rp 300.000/bulan. Sebagian besar responden (46,90%) menggunakan kayu bakar sebanyak \leq 5 ikat/bulan, dan sebagian besar (43,75%) menggunakan kayu bakar sebanyak 6 -10 ikat/bulan. Sebagian besar kegiatan pengambilan kayu bakar dilakukan dengan cara dipikul. Pemanfaatan kayu bakar sebagai salah satu sumber energi rumah tangga. Responden memanfaatkan kayu bakar untuk digunakan sendiri. Hal ini karena mayoritas masyarakat tidak memiliki kompor gas.

Mayoritas responden (81,25%) tidak memanfaatkan tumbuhan obat, dan sebanyak 18,75% yang memanfaatkan tumbuhan obat. Jenis tanaman dan tumbuhan obat yang dimanfaatkan antara lain: ilalang, alang-alang, cecenet, daun alpukat, reundeu, poh-pohan, antanan, dan daun pepaya. Pemanfaatan tumbuhan obat yang mereka lakukan sebatas kebutuhan apabila sakit, yaitu rata-rata dua kali per bulan.

Mayoritas responden (93,75%) tidak mengambil tanaman hias di dalam kawasan TNGHS. Sebanyak 6,25% responden yang mengambil tanaman hias di dalam kawasan yang berupa tanaman anggrek dengan harga jual Rp 5.000/pohon. Pengambilan tanaman hias di kawasan secara *dejure* melanggar aturan.

Mayoritas responden (93,75%) tidak mengambil tumbuhan kerajinan tangan yang berupa tumbuhan rotan. Rotan banyak tumbuh di dalam kawasan hutan TNGHS. Sebanyak 6,25% responden yang mengambil rotan di dalam kawasan TNGHS yaitu sebanyak lima batang per enam bulan dengan panjang batang sebesar empat meter. Pemanfaatan rotan hanya sebatas kebutuhan untuk pembuatan tas dan keranjang untuk kebutuhan sendiri.

Jenis buah-buahan yang dimanfaatkan berupa durian, pete, pisang, alpukat, manggis, cengkeh, rambutan,

mangga, nangka dan jambu. Pengambilan buah-buahan yang mereka lakukan adalah di lahan garapan di kawasan TNGHS berupa kebun dengan pola tanam secara polikultur. Penanaman jenis buah-buahan sudah lama mereka lakukan, yaitu sejak sebelum adanya perluasan kawasan. Sebanyak 8 responden (25,0%) memanfaatkan buah durian; pete (6,25%) ; alpukat (25,0%); pisang (34,37%) ; buah manggis (6,25%); cengkeh (3,12%) ; buah rambutan (3,12%) ; buah mangga (3,12%); buah nangka (6,25%) dan 3,12% responden memanfaatkan buah jambu.

Sebanyak 43,75% responden mengambil bambu di dalam kawasan TNGHS. Pada umumnya mengambil bambu hanya untuk memenuhi kebutuhan sendiri, namun sebagian kecil responden mengambil bambu sebagai sumber pendapatan. Tanaman bambu tersebut mereka tanam sejak sebelum adanya perluasan kawasan yang merupakan lahan garapan di kawasan TNGHS. Jenis bambu yang diambil antara lain bambu mayan, bambu tali, bambu gumbang. Rata-rata bambu yang diambil sebanyak tujuh batang dengan kisaran antara 1-30 batang per bulan. Sebanyak 3 responden (9,37%) yang menjual bambu kepada tengkulak dengan harga jual Rp 2.000 sampai Rp 5.000 per batang. Hal ini dilakukan karena mereka menganggap bambu tersebut miliknya karena mereka tanam pada saat sebelum adanya perluasan kawasan.

Sebanyak 12,5% responden yang menanam kapulaga di lahan garapan di kawasan TNGHS dengan kisaran jumlah tanaman kapulaga sebanyak 20 - 300 rumpun. Produksi kapulaga per tiga bulan berkisar antara 30-200 kg dengan harga jual Rp 5.000/kg, sehingga pendapatan responden dari tanaman kapulaga sebesar Rp 150.000 - Rp 1.000.000 per tiga bulan.

Mayoritas responden (84,38%) tidak menanam sayur-sayuran di lahan garapan di kawasan TNGHS. Sebanyak 15,62% responden yang menanam sayur-sayuran di lahan kawasan. Jenis sayur-sayuran yang di tanam adalah salad, rendeu, kacang panjang, poh-pohan, dan terubuk. Pendapatan responden dari tanaman terubuk sebesar Rp 30.000/bulan, kacang panjang Rp 6.000/bln, salad, poh-pohan dan rendeu masing masing sebesar Rp 4.000/bln.

Sebagian besar responden (40,62%) memanfaatkan rumput di kawasan TNGHS sebagai pakan ternak. Masyarakat desa sekitar hutan sebagian besar memiliki hewan ternak baik sapi, kerbau, kambing maupun domba. Banyaknya kepemilikan ternak sangat mempengaruhi tingkat pemanfaatan komoditi rumput (Birgantoro dan Nurrochmat 2007). Jenis rumput yang diambil antara lain adalah rumput nampang dan jampang, sedangkan jenis daun sebagai pakan ternak terdiri dari daun kayu afrika dan daun kayu jenjing. Pemanfaatan rumput berlangsung sepanjang tahun dengan intensitas pemanfaatan setiap hari. Rata-rata pemungutan sebesar 1-2 karung/hari. Apabila diupahkan dalam pengambilannya yaitu sebesar Rp 15.000/karung. Rata rata responden memiliki ternak kambing 2 - 4 ekor. Sebanyak dua responden mengambil rumput dua karung/hari. Hal ini karena jumlah ternak yang dipeliharanya lebih banyak dari responden lainnya, yaitu 5-10 ekor kambing. Apabila dihitung secara ekonomi maka nilai manfaat rumput-rumputan sebagai pakan ternak yang

terdapat di kawasan TNGHS rata-rata sebesar Rp 450.000/bulan/responden.

Tabel 1. Jenis pemanfaatan hasil hutan bukan kayu

Jenis pemungutan HHBK	Jumlah responden			
	Memanfaatkan	Persentase (%)	Tidak memanfaatkan	Persentase (%)
Kayu Bakar	32	100,0	-	-
≤ 5 ikat	15	46,90	-	-
6 - 10 ikat	14	43,75	-	-
11-15 ikat	3	9,35	-	-
Tanaman Obat	6	18,75	26	81,25
Tanaman hias (Anggrek)	2	6,25	30	93,75
Kerajinan tangan (rotan)	2	6,25	30	93,75
Buah-buahan				
a. Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	8	25,00	24	75,00
b. Petai (<i>Parkia speciosa</i>)	2	6,25	30	93,75
c. Alpukat (<i>Persea americana</i>)	8	25,00	24	75,00
d. Pisang (<i>Musa paradisiaca</i>)	11	34,38	21	65,62
e. Manggis (<i>Garcinia mangostama</i>)	2	6,25	30	93,75
f. Cengkeh (<i>Syzygium aromaticum</i>)	1	3,12	31	96,88
g. Rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>)	1	3,12	31	96,88
h. Mangga (<i>Mangifera indica</i>)	1	3,12	31	96,88
i. Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)	2	6,25	30	93,75
j. Jambu biji (<i>Psidium guajava</i>)	1	3,12	31	96,88
Bambu (<i>Bambusa sp</i>)	14	43,75	18	56,25
Kapulaga (<i>Amomum cardamomum</i>)	4	12,50	28	87,50
Sayuran	5	15,62	27	84,38
Pakan ternak	13	40,62	19	59,38

Tabel 2. Jenis tanaman dan pendapatan responden di lahan garapan di kawasan TNGHS

Jenis tanaman	Jumlah responden	Persentase (%)	Harga satuan	Pendapatan (Rpx1.000)/tahun
Jambu biji (<i>Psidium guajava</i>)	3	9,38	2.000/kg	40 - 300
Kopi (<i>Coffea canephora</i> Pierre)	2	6,25	1.500/kg	300 - 900
Terubuk (<i>Saccharum edule</i> Hasskarl)	1	3,12	3.000/ikat	2.680
Pisang (<i>Musa paradisiaca</i>)	16	50,00	1.000/kg	50 - 1.200
Jengkol (<i>Archidendron pauciflorum</i>)	11	34,38	2.500/kg	75 - 300
Petai (<i>Parkia speciosa</i>)	15	46,88	50.000/ikat	350 - 1.200
Gula aren (<i>Arenga pinnata</i> Merr)	10	31,25	7.000/kg	2.400 - 8.400
Durian (<i>Durio zibethinus</i>)	26	81,25	10.000/bh	100 - 1.200
Cengkeh (<i>Syzygium aromaticum</i>)	7	21,88	14.000/kg	250 - 2.500
Alpukat (<i>Persea americana</i>)	19	59,38	3.000/kg	60 - 1.250
Mangga (<i>Mangifera indica</i>)	9	28,12	5.000/kg	Belum produksi
Rambutan (<i>Nephelium lappaceum</i>)	5	15,62	5.000/kg	150
Nangka (<i>Artocarpus heterophyllus</i>)	12	37,50	1.000/kg	40 - 500
Sirsak (<i>Annona muricata</i> L.)	1	3,12	5.000/kg	50.000
Bambu (<i>Bambusa sp</i>)	7	21,88	2.000/batang	60 - 700
Kapulaga (<i>Amomum cardamomum</i>)	26	81,25	5.000/kg	600 - 4.800
Kayu Manglid (<i>Manglietia glauca</i> Bl)	16	50,00	30.000/batang	600

Penggunaan lahan garapan di kawasan TNGHS

Pihak pengelola TNGHS memberikan kebijaksanaan pada masyarakat yang menggarap lahan sebelum adanya perluasan kawasan TNGHS, yaitu sejak pengelolaan oleh Perum Perhutani. Sebagian besar responden menggarap lahan garapan di kawasan TNGHS berupa kebun sejak sebelum adanya perluasan kawasan. Rata-rata luas garapan yang mereka kelola berkisar 0,04 ha sampai 1,0 ha. Tingkat pemenuhan masyarakat terhadap kawasan TNGHS

ditunjukkan dengan besarnya ketergantungan masyarakat terhadap kawasan TNGHS. Untuk mencukupi kebutuhan masyarakat, maka daerah kawasan TNGHS menjadi alternatif bagi pemenuhan kebutuhan pokok hidup masyarakat. Penggunaan lahan TNGHS memberikan kontribusi sebesar 42,29% terhadap total pendapatan rumah tangga responden (Adalina et al. 2015). Jenis tanaman yang dibudidayakan berupa kebun antara lain tanaman kayu-kayuan, tanaman buah-buahan, dan tanaman obat dengan

pola tanam secara polikultur dan sudah lama mereka lakukan, yaitu sejak sebelum adanya perluasan kawasan menjadi TNGHS.

Selain memanfaatkan HHBK responden juga memanfaatkan jenis kayu-kayuan yang ditanam di lahan garapan di kawasan TNGHS. Secara umum interaksi masyarakat dengan hutan tidak terlepas dari kegiatan negatif (ilegal). Secara de jure penebangan kayu dilahan garapan di kawasan TNGHS dilarang. Sebanyak 15,62% responden yang memanfaatkan kayu bangunan. Pada umumnya kayu tersebut mereka jual dengan harga Rp 20.000/batang untuk menambah penghasilan ekonomi rumah tangga. Hal ini karena mereka menganggap bahwa kayu tersebut adalah miliknya, karena mereka yang menanamnya di lahan garapan yang pada saat itu belum adanya perluasan kawasan. Jenis kayu yang ditanam antara lain kayu jenjing, kayu afrika dan kayu tisuk. Jumlah pohon yang ditebang berkisar antara 2-20 pohon/tahun, tergantung kebutuhan ekonomi rumah tangga responden.

Jenis tanaman kayu yang dibudidayakan antara lain jenjing, tisuk, manglid, afrika, jabon, dan aren. Jenis tanaman buah-buahan antara lain: alpukat, durian, petai, cengkeh, rambutan, jengkol, pisang, nangka, jambu, dan mangga. Jenis tanaman obat yang dibudidayakan adalah kapulaga. Jenis tanaman yang paling banyak dibudidayakan adalah kapulaga, alpukat dan durian. Sebagian besar responden menanam kayu tisuk dan jenjing. Hal ini karena mudah mendapatkan bibitnya dan mudah perawatannya. Sebanyak 78,12% responden menjual hasil budidayanya ke tengkulak. Hal ini dilakukan karena terbatasnya sarana dan prasarana angkutan untuk menjual ke pasar sehingga responden tidak mempunyai posisi tawar yang tinggi.

Sebagai kesimpulan, pemanfaatan hasil hutan bukan kayu (HHBK) oleh masyarakat Adat Kasepuhan Sinar Resmi adalah jenis HHBK nabati yang terdiri dari tanaman obat, tanaman hias, rotan, kayu bakar, bambu, pakan ternak, dan buah-buahan. Pemanfaatan sumberdaya hutan yang paling besar berupa kayu bakar dan rumput sebagai pakan ternak. Jenis HHBK yang paling banyak dibudidayakan masyarakat yang ditanam pada lahan garapan di kawasan TNGHS adalah tanaman alpukat, durian dan kapulaga. Pemanfaatan nira aren yang diproses menjadi gula mempunyai nilai ekonomi yang paling tinggi dibandingkan jenis HHBK lainnya.

Perlu adanya sosialisasi dan pendampingan oleh pihak pengelola TNGHS secara partisipatif supaya pengelolaan hutan secara lestari yang seimbang secara ekologis, ekonomi dan sosial. Tanaman penghasil HHBK yang mempunyai nilai ekonomi tinggi seperti tanaman aren perlu

dikembangkan dalam menunjang kebutuhan ekonomi masyarakat Desa Sirna Resmi.

DAFTAR PUSTAKA

- Adalina Y, Nurrochmat DR, Darusman D, Sundawati L. 2015. Kondisi sosial ekonomi masyarakat di sekitar Taman Nasional Gunung Halimun Salak. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 12 (2): 105-118.
- Balai TNGHS. 2007. Rencana Pengelolaan Taman Nasional Gunung Halimun Salak Periode 2007-2026. BTNGHS, Kabandungan, Sukabumi.
- Birgantoro BA, Nurrochmat DR. 2007. Pemanfaatan sumberdaya hutan oleh masyarakat di KPH Banyuwangi Utara. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika* 13 (3): 172-181
- Budiman A, Adhikerana AS. 2000. Rencana pemantapan dan pengelolaan sumberdaya alam Taman Nasional Gunung Halimun. BTNGHS, Kabandungan, Sukabumi.
- Jacobson MG, Shiba PK. 2012. NTFP income contribution to household economy and related socio-economic factors: Lessons from Bangladesh. *For Pol Econ* 14: 136-142.
- Junaedi E, Maryani R. 2013. Pengaruh dinamika spasial sosial ekonomi pada suatu Lanskap Daerah Aliran Sungai (DAS) Terhadap Keberadaan Lanskap Hutan (Studi kasus pada DAS Citanduy Hulu dan DAS Ciseel, Jawa Barat. *Jurnal Penelitian Sosial Ekonomi Kehutanan* 10 (2): 122-139.
- Kadir A. 2005. Pengembangan sosial forestry di SPUC Borisallo: analisis sosial ekonomi dan budaya masyarakat. *Info Sosial Ekonomi* 5 (2): 297-309.
- Kartodihardjo H. 2013. Tantangan penggunaan inter-disiplin dalam pengelolaan hutan: anjuran koalisi ilmu-ilmu manajemen hutan, ekonomi dan institusi. *Jurnal Manajemen Hutan Tropika*, 19 (3): 216-218.
- Masri. 2010. Identifikasi Karakteristik Sosial, Ekonomi dan Budaya Masyarakat Nelayan Sungai Limau di Kabupaten Padang Pariaman Dalam penyediaan Perumahan Pemukiman. [Tesis]. Program Pascasarjana, Universitas Diponegoro. Semarang.
- Rahmawati R, Subair, Idris, Gentini, Dian E, Usep S. 2008. Pengetahuan lokal masyarakat adat Kasepuhan: adaptasi, konflik dan dinamika sosio-ekologis. *Jurnal Transdisiplin Sosiologi, Komunikasi, dan Ekologi Manusia* 2: 153-186.
- Ristianasari, Muljono P, Gani DS. 2013. Dampak program pemberdayaan model desa konservasi terhadap kemandirian masyarakat: kasus di Taman Nasional Bukit Barisan Selatan Lampung. *Jurnal Penelitian Sosial dan Ekonomi* 10 (3):173-185.
- Suhaeri. 1994. Pengembangan Kelembagaan Taman Nasional Gunung Halimun. [Tesis]. Bogor. Sekolah Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor.
- Waluyo EA, Ulya NA dan Martin E. 2010. Perencanaan sosial dalam rangka pengembangan hutan rakyat di Sumatera Selatan. *Jurnal Penelitian Hutan dan Konservasi Alam* 8 (3): 271-280.
- Watum N, Dien C, Kotambunan O. 2013. Karakteristik sosial ekonomi masyarakat nelayan di Desa Lopana Kecamatan Amurang Timur Provinsi Sulawesi Utara. *Jurnal Akulturasi* 1 (2): 9-12.
- Yatap H. 2008. Pengaruh Peubah Sosial Ekonomi Terhadap Perubahan Penggunaan dan Penutupan Lahan di Taman Nasional Gunung Halimun Salak [Tesis]. Program Pascasarjana, Institut Pertanian Bogor. Bogor.